



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RENELI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **626783**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 555.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/101 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 333.936.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m2/70 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 99.168.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/36 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 83.376.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 12.800.000
5. Tanah Seluas 960 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.920.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 129.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. MOBIL, OPEL BLAZER MINIBUS Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 9.700.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.309.706
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	709.209.706
III. HUTANG	Rp.	140.987.312
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	568.222.394

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.